

Judul : Komisi IV tegaskan evaluasi menyeluruh kebijakan pupuk bersubsidi
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Komisi IV Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Pupuk Bersubsidi



Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sudin menegaskan agar evaluasi menyeluruh pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi segera dilakukan. Pasalnya, anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program pupuk subsidi masih belum efektif meningkatkan produktivitas para petani Indonesia.

"Isu ini kerap kali menjadi topik pembahasan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, baik di rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, apa tindakan yang sudah dilakukan?" tegas Sudin saat membuka rapat dengar pendapat membahas permasalahan pupuk di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Berdasarkan informasi yang diterima, Sudin menjabarkan terdapat sejumlah permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Diantaranya, ketersediaan pupuk yang tidak sesuai dengan musim tanam, validitas data pada e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), perdagangan pupuk ilegal, hingga praktik

penjualan pupuk bersubsidi secara *bundling* dengan produk pertanian.

"Kalau otak enggak benar, ya sudah enggak benar saja. Mau pakai cara apa pun, ya enggak bisa. Ini mungkin enggak, dalam waktu dekat ini Kementerian Pertanian (Kementan) membuat terobosan untuk *meng-collect* data dulu yang mana saja berhak mendapatkan pupuk bersubsidi?" tanyanya.

Pertanyakan alokasi

Di sisi lain, politisi Partai PDI-Perjuangan itu juga mempertanyakan alokasi pupuk bersubsidi pada sektor perikanan yang tidak ada kejelasan dalam penyalurannya.

Mengetahui koordinasi yang tidak sinkron, Sudin menekankan untuk memisahkan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Antar-*stakeholder* menjadi jelas tupoksinya, sekaligus tidak saling lempar tanggung jawab.

Oleh karena itu, tegas Sudin, DPR akan mengundang pihak terkait seperti Sekjen

Kementan RI, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementan, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP, dan Dirut PT Pupuk Indonesia.

"Kita minta segera dibenahi RDKK sekaligus menindak keterlibatan oknum distributor pupuk di masing-masing wilayah Indonesia," paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjelaskan tindak lanjut Kementan terhadap rekomendasi Tim Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI berupa mengusahakan petani dengan lahan kurang dari 2 hektar menerima pupuk bersubsidi, menentukan prioritas penerima pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan pangan pokok dan komoditas terdampak inflasi, mengusulkan penambahan anggaran hingga menyusun mekanisme pendataan penerima pupuk bersubsidi setelah alokasi ditetapkan. [ADV/*]